

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didirikan pada 1912, di kota Moskow, Rusia, *Russian Football Union* (*RFU*), merupakan badan pengelola sepakbola Rusia, yang secara penuh bertanggung jawab atas, segala aspek untuk mengatur, mengelola, sepakbola yang ada di Rusia. *RFU* sendiri merupakan sebuah lembaga olahraga, yang terkhusus, bertanggung jawab penuh terhadap olahraga sepakbola Rusia, *RFU* mengkoordinasikan segala kegiatan sepakbola Rusia, termasuk mengatur kompetisi sepakbola Rusia secara domestik, maupun internasional. Untuk mencapai kepentingan dari sebuah lembaga tersebut, *RFU* menguatkan posisi mereka sebagai lembaga olahraga domestik, untuk mencapai kekuatan Rusia di bidang olahraga, terkhusus sepakbola, secara global, dengan beberapa cara seperti pengembangan pemain muda, pelatih, dan upaya menjaga hubungan baik *RFU* dengan federasi sepakbola internasional, yang diantaranya yaitu *FIFA* maupun *UEFA*¹.

RFU sendiri memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya yaitu sebagai organisasi kompetisi, yang dimana *RFU*, bertanggung jawab untuk mengatur, dan menjalankan kompetisi sepakbola di seluruh penjuru negara Rusia, dari level amatir, hingga profesional, baik dalam liga amatir, liga utama Rusia, hingga

¹ Bbc Sports, "Football Union of Russia," BBC.com, n.d., <https://www.bbc.com/sport/football/teams/russia>.

kejuaraan level internasional bagi tim nasional Rusia. *RFU* berkewajiban untuk mengatur dan mengelola sepakbola Rusia untuk dapat berkompetisi dalam skala internasional seperti penyelenggaraan *FIFA World Cup*, oleh karena itu *RFU*, berkewajiban untuk memilih pemain, maupun pelatih yang akan ditugaskan untuk berpartisipasi dan membawa nama baik Rusia pada kejuaraan sepakbola internasional, *FIFA World Cup*². Oleh karena itu, *RFU*, harus menjaga hubungan baik bagi lembaga nya dengan melakukan koordinasi, kepada organisasi olahraga internasional *FIFA*, dalam upaya menjaga reputasi sepakbola Rusia, secara global, agar memudahkan Rusia untuk mendapatkan hak partisipasi dalam kompetisi *FIFA World Cup*.

FIFA World Cup atau lebih dikenal dengan piala dunia merupakan sebuah ajang turnamen sepakbola internasional yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali oleh *Federation International de Football Association (FIFA)*³, dimana setiap tim perwakilan negara memiliki hak untuk keikutsertaan dalam ajang tersebut melalui babak kualifikasi. Tentunya ajang piala dunia tersebut sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat penjurus dunia terutama bagi penggemar sepakbola, untuk berpartisipasi dalam mendukung tim perwakilan negaranya masing-masing untuk bermain di piala dunia⁴. Akan tetapi berbeda dengan tim perwakilan Rusia, yang dimana *FIFA* selaku penyelenggara piala dunia secara resmi melakukan

² *FIFA*, "Russian Football Union," Inside *FIFA*, n.d., <https://inside.FIFA.com/associations/RUS>.

³ *FIFA*, "*FIFA World Cup*," *FIFA.com*, 2024, <https://www.FIFA.com/en/tournaments/mens/worldcup>.

⁴ Emil Radhiansyah Radhiansyah, Dinar Jovian, and Salsabilla Zafira Leonita, "Analisis Kewenangan *FIFA* Atas Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 16–34, <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>.

pemblokiran kepada Rusia dalam ajang piala dunia 2022, oleh karena itu tim nasional Rusia dilarang berpartisipasi atau bermain di ajang piala dunia 2022⁵, dan kompetisi *FIFA* lainnya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Serangan yang dilancarkan oleh Rusia pada bulan Februari tahun 2022 menjadi alasan utama *FIFA* sebagai federasi sepakbola yang menyelenggarakan piala dunia melarang Rusia untuk ikut serta di kompetisi tersebut⁶.

Serangan yang dilancarkan oleh Rusia kepada Ukraina pada tahun 2022, telah menjadi masalah utama kebijakan internasional, serta menimbulkan kekhawatiran terkait situasi berbahaya di Ukraina⁷. Serangan tersebut dimulai pada bulan Februari tahun 2022, dimana Rusia menyerang kota-kota besar Ukraina diantaranya, Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odessa, Sumy, dan Ibu kota Kyiv. Yang diiringi pidato presiden Putin kampanye militer khusus melawan Ukraina. Presiden Putin juga telah lama menentang hubungan dekat Ukraina dengan barat.⁸ Pada 28 Februari putaran pertama pembicaraan terjadi antara Ukraina dan pejabat Rusia di perbatasan Belarusia dan Ukraina. Tetapi pertemuan tersebut tidak berjalan secara efektif, karena tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai⁹. Invasi tersebut

⁵ UEFA, “*FIFA/UEFA* Menskors Klub Dan Tim Nasional Rusia Dari Semua Kompetisi,” 2022, <https://www.uefa.com/news-media/news/0272-148df1faf082-6e50b5ea1f84-1000--FIFA-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-a/>.

⁶ Yanu Arifin, “*FIFA* Larang Rusia Tampil Di Laga Internasional!,” Sport Detik, 2022, <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-5962862/FIFA-larang-rusia-tampil-di-laga-internasional>.

⁷ Riza Andriani and Jeanita Attata, “Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina,” *ResearchGate*, no. March (2022): 1–12.

⁸ Petro Sukhorolskyi, “Russian Aggression against Ukraine: Past, Present, and Futures,” *Journal of Futures Studies* 26, no. 4 (2022): 1–13, [https://doi.org/10.6531/JFS.202206_26\(4\).0001](https://doi.org/10.6531/JFS.202206_26(4).0001).

⁹ Adib Izzuddin, Rossi Indrakornian, and Hastian Akbar Stiarso, “Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022,” *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7226>.

didasari oleh dorongan Rusia untuk mengupayakan perjuangan politiknya atas Ukraina Bersama pengaruh politik eksternal¹⁰, faktor yang mendasari hal tersebut dikarenakan Ukraina sendiri merupakan salah satu yang termasuk dalam lingkungan dari Federasi Rusia dan kekuatan Eropa setelah disintegrasi Uni Soviet, dan orang asli Ukraina Timur Sebagian besar juga merupakan penduduk asli yang berbahasa Rusia. Selain itu Ukraina sendiri merupakan negara terkuat dan terpadat kedua setelah Rusia pasca runtuhnya Uni-Soviet¹¹.

Serangan yang diluncurkan oleh Rusia kepada Ukraina, membuat dewan eksekutif *International Olympic Committee* (IOC) untuk merekomendasikan agar semua *International Sport Federation* (ISF),¹² termasuk *FIFA* untuk melakukan pemblokiran terhadap tim nasional Rusia, agar tidak terlibat dan tidak ikut serta dalam setiap kompetisi yang diadakan, Tindakan yang dilakukan IOC membuat lembaga-lembaga olahraga lainnya melakukan hal serupa, diantaranya UEFA selaku lembaga sepakbola Eropa mengeluarkan *Spartak Moscow* dari liga Eropa, serta melarang seluruh klub asal Rusia untuk berkompetisi dalam kejuaraan liga Eropa, serta memindahkan lokasi final *Champions League* 2022, yang semula berada di St. Petersburg menjadi Paris.¹³ Dalam statement *FIFA* yang menyatakan

¹⁰ Dr. Irfan Hasnain Qaisrani, Mr. Bilal Habib Qazi, and Dr. Hussain Abbas, "A Geopolitical War in Europe: Russia's Invasion of Ukraine and Its Implications," *Journal of European Studies (JES)* 39, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.56384/jes.v39i1.285>.

¹¹ Andrei P Tsygankov, "At War with the West: Russian Realism and the Conflict in Ukraine," *Journal of Military and Strategic Studies* 22, no. 2 (2022).

¹² International Olympic Committee, "Why Did the IOC Suspend the Russian Olympic Committee and What Are the Consequences of This Decision?," n.d., <https://olympics.com/ioc/media/q-a-on-solidarity-with-ukraine-sanctions-against-russia-and-belarus-and-the-status-of-athletes-from-these-countries>.

¹³ UEFA, "2022 UEFA Champions League Final to Be Held at Stade de France in Paris," UEFA, n.d., <https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0272-14876a9f349c-c61e3670721f-1000--stade-de-france-to-stage-final/>.

untuk mengatasi masalah dalam sepakbola *FIFA* berkoordinasi dengan UEFA, yang melibatkan Presiden *FIFA* dan enam Presiden Konfederasi, dengan putusan untuk mengambil tindakan sesuai rekomendasi dari *International Olympic Committee*, dan putusan tersebut akan tetap berlanjut sampai pada waktu yang belum ditentukan¹⁴.

Tujuan dari *RFU*, untuk merespon kebijakan pemblokiran Rusia dalam ajang *FIFA World Cup 2022*, yaitu untuk menunjukkan sikap *RFU*, selaku lembaga negara, yang menaungi segala aspek urusan sepakbola di negara Rusia, terhadap kebijakan Piala Dunia 2022, yang dikaitkan dengan invasi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Dalam hal ini, *FIFA* maupun Rusia, berupaya untuk menjaga integritas, hingga posisi mereka, pada tatanan olahraga global. Pada akhirnya kebijakan yang diputuskan oleh *FIFA* mendapat respon penentangan, yang digugat melalui *Court of Arbitration for Sport (CAS)*, guna menyikapi tindakan kebijakan pemblokiran Rusia yang dilakukan oleh *FIFA*. Dikarenakan menurut *RFU* sanksi yang ditetapkan oleh *FIFA*, bersifat objektif, dan tidak administratif. *RFU* beranggapan, kebijakan tersebut didasari oleh adanya sikap politik *FIFA*, yang dimana bertentangan dengan netralitas politik olahraga. Oleh karena itu Rusia meresponnya sesaat setelah kebijakan tersebut disahkan oleh *FIFA*, dengan cara menggugat kebijakan tersebut kepada *Court of Arbitration for Sport*¹⁵.

¹⁴ *FIFA*, "Bureau of the *FIFA* Council Takes Initial Measures with Regard to War in Ukraine," *cn.FIFA*, n.d., <https://cn.FIFA.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/bureau-of-the-FIFA-council-takes-initial-measures-with-regard-to-war-in>.

¹⁵ CNN, "Rusia Resmi Gugat *FIFA* Dan UEFA Ke CAS," *cnnindonesia.com*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220308195236-142-768483/rusia-resmi-gugat-FIFA-dan-uefa-ke-cas>.

Tentunya *FIFA* selaku organisasi olahraga internasional yang tergugat tidak hanya tinggal diam, *FIFA* langsung merespon gugatan tersebut, dengan beberapa poin yang dipaparkan oleh *FIFA*, untuk menjaga integritas *FIFA* sebagai organisasi olahraga internasional yang menjadi hegemoni dalam dunia sepakbola¹⁶. Dikarenakan bagi *FIFA* memiliki kewajiban serta kewenangannya sendiri, dalam mengatur mengelola, dan bertanggung jawab atas kompetisi yang diadakannya, dengan syarat kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan organisasi *FIFA*, dan juga regulasi yang telah ditetapkan oleh *FIFA* sendiri, dan tidak menyalahi aturan olahraga guna menjaga integritas olahraga secara keseluruhan¹⁷. Oleh karena itu *FIFA* memiliki tugas lebih dari membuat kebijakan atau regulasi baru dalam kompetisi *FIFA World Cup 2022*, akan tetapi tentunya kebijakan tersebut akan mengundang berbagai protes dan gugatan terutama bagi negara, atau lembaga yang bersangkutan dengan kebijakan yang dibuat oleh *FIFA*. Oleh karena itu *FIFA* harus mempersiapkan tanggung jawab tersebut untuk merespon, protes tersebut sesuai dengan pengadilan hukum olahraga internasional, secara resmi.

Polemik mengenai fenomena pemblokiran Rusia dari ajang *FIFA World Cup 2022* menunjukkan adanya dua hal penting mengenai bagaimana legitimasi *FIFA* selaku organisasi internasional yang berwewenang penuh selaku penyelenggara agenda tersebut agar tetap menjalankan hukum olahraga

¹⁶ Arry Bainus, Rusadi Kantaprawira, and Indra Kusumawardhana, "When *FIFA* Rules the World: Hegemoni *FIFA* Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 7, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.25077/ajis.7.2.103-129.2018>.

¹⁷ Radhiansyah, Jovian, and Leonita, "Analisis Kewenangan *FIFA* Atas Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023."

internasional, serta bagaimana dampak dari adanya kebijakan tersebut bagi atlet Rusia yang tidak terlibat dalam invasi yang dilancarkan oleh pemerintah Rusia, yang kemudian kebijakan yang diputuskan oleh *FIFA* tersebut tentunya mendapatkan respon secara cepat, yang diberikan oleh *Russian Football Union (RFU)*, untuk menanggapi kebijakan yang diputuskan oleh *FIFA* tersebut, dengan mencapai beberapa kesepakatan kepada badan pengadilan hukum olahraga internasional. Oleh karena itu penelitian kali ini menarik untuk dibahas, dengan melihat dinamika penyelesaian sengketa kebijakan yang dilakukan organisasi non-pemerintahan *FIFA*, dan juga lembaga *RFU*, selaku lembaga yang merepresentasikan negara melalui hukum olahraga.

1.2` Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, dapat diketahui rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana upaya *FIFA* dalam penyelesaian gugatan *Russian Football Union* terhadap pemblokiran Rusia pada ajang *FIFA World Cup 2022*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan merumuskan tujuan dari penelitian ini dengan sebagai untuk mengetahui upaya *FIFA* dalam penyelesaian terhadap gugatan *RFU* dalam kebijakan untuk melakukan

pemblokiran tim nasional Rusia dalam ajang *FIFA World Cup 2022*, yang diputuskan oleh *FIFA*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat manfaat utama yang bisa didapatkan dari penelitian ini, yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hubungan internasional. Dengan mendeskripsikan kasus interaksi kebijakan *FIFA* dan *RFU* terkait kebijakan pemblokiran yang dilakukan *FIFA* kepada tim nasional Rusia, dengan memperhatikan beberapa aspek, ditengah mencekamnya situasi perang di Ukraina. peneliti dapat berkontribusi untuk membuktikan relevansi teori global sport governance, dan konsep organisasi internasional dalam kasus pemblokiran yang dilakukan oleh *FIFA* kepada Rusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang berpeluang dalam mengembangkan serta membantu penelitian yang akan datang serta memberikan informasi yang relevan dalam studi Hubungan Internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat sepuluh rujukan dalam proses penelitian ini, yang pertama adalah melalui *The International Sports Journal* yang ditulis oleh Johan Lindholm, tahun 2022, yang berjudul *How Russia's Invasion of Ukraine Shook Sports' Foundation*,

membahas mengenai bagaimana Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik balik besar bagi prinsip netralitas politik yang selama ini menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan olahraga internasional. Prinsip yang menekankan olahraga sebagai arena apolitik ternyata runtuh dengan cepat di tengah tekanan global dan konflik nyata yang terjadi. Organisasi olahraga utama seperti IOC, FIFA, UEFA, dan lainnya dengan cepat mengambil tindakan tegas, seperti melarang atlet dan tim Rusia serta Belarus berpartisipasi dalam kompetisi, membatalkan event-event di Rusia, serta memutuskan hubungan sponsor dan kontrak bisnis terkait. Tindakan ini menunjukkan bahwa olahraga tidak bisa lagi bersembunyi di balik klaim netralitas politik ketika menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan agresi militer. Meskipun tindakan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan etika, terutama terkait kewenangan dan proporsionalitas sanksi, peristiwa ini menegaskan bahwa olahraga memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara dan bertindak melawan ketidakadilan. Dengan runtuhnya dogma netralitas, masa depan olahraga internasional kemungkinan akan lebih terbuka untuk keterlibatan politik dan advokasi hak asasi manusia, menjadikan olahraga bukan sekadar arena kompetisi, tetapi juga medium untuk perubahan sosial dan perdamaian..¹⁸

Rujukan yang kedua adalah melalui *The International Journal of the History of Sport* yang ditulis Anna Koierecka tahun 2024, yang berjudul “*Enforced Ostracism? Analysis of the International Sports Organizations’ Reactions to the*

¹⁸ Johan Lindholm, “How Russia’s Invasion of Ukraine Shook Sports’ Foundation,” *International Sports Law Journal* 22, no. 1 (2022): 1–4, <https://doi.org/10.1007/s40318-022-00211-8>.

2022 Russian Invasion of Ukraine” Penulis mengkaji bagaimana organisasi olahraga internasional merespons invasi tersebut, dengan fokus pada keputusan untuk mengisolasi Rusia dan Belarusia dari kompetisi internasional. Langkah ini mencerminkan pergeseran dari tradisi netralitas politik dalam olahraga menuju tindakan yang lebih politis. Analisis ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, waktu pengambilannya, dan dampaknya terhadap hubungan antara olahraga dan politik. Keputusan ini juga memunculkan perdebatan tentang apakah organisasi olahraga internasional seharusnya mencampuri urusan politik atau tetap berpegang pada prinsip netralitas. Penulis menyoroti bahwa meskipun olahraga sering dianggap sebagai arena netral, kenyataannya sering kali terlibat dalam dinamika politik global. Jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi olahraga internasional menavigasi dilema etis dan politik dalam konteks konflik internasional, serta dampaknya terhadap integritas dan tujuan olahraga itu sendiri¹⁹.

Rujukan ketiga adalah melalui skripsi Universitas Islam Indonesia yang ditulis oleh AFIFA Hanifati yang berjudul “Sanksi Olahraga FIFA Sebagai Upaya Peacebuilding Antara Rusia dan Ukraina 2022” yang membahas mengenai Konflik Rusia-Ukraina yang memuncak sejak invasi Rusia pada Februari 2022 menarik perhatian dunia internasional, termasuk organisasi olahraga global seperti FIFA. FIFA memberikan sanksi berupa penangguhan terhadap Tim Nasional Rusia

¹⁹ Anna Koierecka & Michal Marcin, “ENFORCED OSTRACISM? ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS’ REACTIONS TO THE 2022 RUSSIAN INVASION OF UKRAINE,” *Melalui The International Journal of the History of Sport*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09523367.2024.2306860>.

sebagai respons terhadap tindakan militer Rusia di Ukraina. Hal ini menjadi contoh implementasi sanksi olahraga sebagai instrumen peacebuilding atau upaya membangun perdamaian melalui tekanan non-militer.

Menurut teori peace building yang dikembangkan oleh John Agbonifo, keberhasilan sanksi dalam menyelesaikan konflik dapat diukur melalui tiga indikator utama: pemaksaan (apakah sanksi mampu mengubah perilaku target), pembatasan (apakah sanksi membatasi ruang gerak target), dan signaling (apakah sanksi memberi sinyal yang efektif mengenai pelanggaran norma internasional). Skripsi ini menggunakan kerangka tersebut untuk menilai efektivitas sanksi *FIFA* terhadap Rusia. Beberapa studi sebelumnya menyatakan bahwa olahraga memang bisa menjadi alat diplomasi dan perdamaian, membuka ruang interaksi antar negara yang berkonflik. Namun, kasus Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa sanksi olahraga tidak selalu efektif, terutama ketika konflik bersifat sangat kompleks dan terkait kepentingan geopolitik yang kuat. Dalam kasus tersebut, meskipun *FIFA* menjatuhkan sanksi yang cukup ketat seperti pelarangan penggunaan nama "Timnas Rusia", pertandingan tanpa penonton, dan pelarangan pertandingan di wilayah Rusia Rusia tetap melanjutkan aktivitas sepakbolanya melalui pertandingan persahabatan dan mengabaikan tekanan internasional. Ini menunjukkan bahwa sanksi olahraga gagal dalam tiga indikator yang digunakan: tidak mampu memaksa Rusia menghentikan invasi, tidak membatasi secara efektif aktivitas sepakbola Rusia, dan gagal memberikan sinyal kuat kepada pemerintah Rusia terkait pelanggaran hukum internasional. Faktor kegagalan ini juga diperkuat oleh fakta bahwa sanksi tersebut tidak menyentuh inti kepentingan Rusia, yaitu

penolakan terhadap aliansi Ukraina dengan NATO dan isu keamanan nasional. Selain itu, sanksi tersebut tidak dijatuhkan secara bersamaan dengan sanksi internasional lain yang lebih luas, sehingga pengaruhnya terbatas. Penelitian ini menyarankan agar ke depan kajian mengenai efektivitas sanksi olahraga sebagai alat penyelesaian konflik perlu lebih mendalam, khususnya dalam konteks konflik yang sangat politis dan militer. Hal ini penting agar organisasi seperti *FIFA* dapat mengoptimalkan perannya dalam peace building dan memformulasikan kebijakan yang lebih efektif²⁰.

Rujukan keempat adalah melalui jurnal *Accounting, Auditing & Accountability Journal* yang ditulis oleh Abdel K. Halabi yang berjudul “*Football is War*” – *FIFA's Reactions to a Real War and the Response of Football Fans*” yang membahas *FIFA* menghindari keterlibatan dalam isu politik dan sosial yang kontroversial demi menjaga netralitas dan integritas kompetisi. Namun, invasi Rusia ke Ukraina memaksa *FIFA* mengambil sikap tegas dengan mengutuk tindakan agresi tersebut dan melarang tim-tim Rusia berpartisipasi dalam kompetisi internasional sementara waktu. Langkah ini merupakan perubahan signifikan dari kebijakan *FIFA* sebelumnya yang biasanya menghindari konflik politik. Dari perspektif teori legitimasi dan *voluntary disclosure*, tindakan *FIFA* ini bisa dipandang sebagai upaya untuk merebut kembali kepercayaan publik dan memperbaiki citra organisasi pasca-skandal korupsi yang pernah mencoreng nama *FIFA*. Melalui media sosial, khususnya Twitter, *FIFA* dapat secara cepat dan

²⁰ AFIFA HANIFATI, “SANKSI OLAHRAGA *FIFA* SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING ANTARA RUSIA DAN UKRAINA 2022,” *Universitas Islam Indonesia* (2023).

langsung menjangkau pemangku kepentingan global serta menunjukkan komitmen etisnya dalam menanggapi isu sosial yang besar. Namun, respons dari komunitas penggemar sepak bola beragam. Meskipun banyak yang mendukung tindakan *FIFA*, analisis terhadap komentar menunjukkan adanya kritik dan penolakan, terutama terkait pandangan bahwa olahraga seharusnya terpisah dari politik. Hal ini mengindikasikan risiko yang dihadapi organisasi olahraga ketika menyangkut isu-isu sosial yang kontroversial, di mana sikap yang diambil dapat mengalienasi sebagian stakeholder. Dengan demikian, penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana organisasi olahraga internasional seperti *FIFA* mengelola komunikasi sosial di era digital dan dampaknya terhadap persepsi publik, khususnya dalam konteks krisis politik yang nyata²¹.

Rujukan kelima adalah melalui jurnal *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* yang ditulis oleh Bainus, Arry Kantaprawira, Rusadi Kusumawardhana, Indra yang berjudul “*When FIFA Rules the World: Hegemoni FIFA Terhadap Indonesia dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016*” yang membahas Kasus pembekuan PSSI oleh *FIFA* pada tahun 2015-2016 membuka realitas lemahnya posisi negara Indonesia ketika berhadapan dengan organisasi internasional seperti *FIFA* yang memiliki otoritas global dalam dunia sepak bola. Sanksi tersebut berakar pada prinsip non-intervensi *FIFA* terhadap organisasi sepak bola nasional, yang melarang campur tangan pemerintah dalam urusan sepak bola domestik, sebagaimana tertuang dalam Statuta *FIFA*. Sejumlah penelitian

²¹ Abdel K. Halabi and Brendan O’Connell, “‘Football Is War’ – *FIFA*’s Reactions to a Real War and the Response of Football Fans,” *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 37, no. 2 (2024): 700–706, <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2022-5831>.

sebelumnya membahas konflik antara Indonesia, PSSI, dan *FIFA* dengan fokus pada dinamika dan penyelesaian konflik, namun penelitian ini menitikberatkan pada pertanyaan mengapa negara tidak berdaya menghadapi *FIFA* sebagai organisasi global. Pendekatan yang digunakan mengacu pada teori hegemoni Robert Cox yang mengadopsi pemikiran Antonio Gramsci, melihat hegemoni sebagai suatu relasi kekuasaan yang mengandalkan konsensus dan kontrol ideologis melalui struktur institusional, ide, dan kapasitas material. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang hubungan kekuasaan antara negara dan organisasi global non-negara dengan menunjukkan bahwa hegemoni *FIFA* tidak hanya bergantung pada kapasitas ekonomi, tetapi juga pada penguasaan narasi dan institusi yang menciptakan konsensus global tentang tata kelola sepak bola yang ideal, yang menempatkan negara dalam posisi subordinat²².

Rujukan keenam adalah melalui *Journal of International Affairs* yang ditulis oleh Sean Ingle dengan judul “*the Fallout of Russia's Invasion in the Wide World of Sports*” yang membahas mengenai bagaimana dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap dunia olahraga internasional, dengan menyoroti bagaimana konflik geopolitik ini mempengaruhi kebijakan, identitas, dan diplomasi olahraga global. Ingle menyoroti bahwa olahraga sering kali digunakan sebagai alat politik, baik oleh negara-negara besar maupun organisasi internasional. Ingle mengungkapkan bahwa olahraga seringkali digunakan sebagai alat politik, baik oleh negara-negara besar maupun organisasi internasional. Contohnya, Rusia,

²² Bainus, Kantaprawira, and Kusumawardhana, “When *FIFA* Rules the World: Hegemoni *FIFA* Terhadap Indonesia Dalam Kasus Pembekuan PSSI 2015-2016.”

sebagai negara dengan sejarah panjang dalam dunia olahraga, menghadapi sanksi internasional yang mempengaruhi partisipasi atlet dan penyelenggaraan acara olahraga. Setelah invasi Rusia, berbagai organisasi internasional dan federasi olahraga mengambil langkah-langkah untuk merespons situasi tersebut. Misalnya, Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Komite Paralimpiade Internasional (IPC) melarang atlet dan pejabat Rusia serta Belarus dari partisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing. Langkah serupa diambil oleh federasi olahraga lainnya, seperti *FIFA* dan *UEFA*, yang menanggukkan tim nasional Rusia dari kompetisi internasional. Invasi tersebut tidak hanya mempengaruhi hubungan antar negara, tetapi juga berdampak langsung pada atlet. Atlet dari Ukraina dan negara-negara lain menunjukkan solidaritas dengan menentang partisipasi atlet Rusia dan Belarusia dalam kompetisi internasional. Sebaliknya, beberapa atlet dari Rusia menghadapi sanksi atau diizinkan untuk berkompetisi sebagai individu netral, tergantung pada kebijakan masing-masing federasi olahraga. Artikel ini juga mengangkat dilema yang dihadapi oleh Gerakan Olimpiade dalam mempertahankan prinsip netralitas politik. Meskipun olahraga seharusnya menjadi sarana untuk perdamaian dan persatuan, kenyataannya seringkali terjebak dalam konflik politik global. Keputusan untuk melarang atau mengizinkan partisipasi atlet dari negara-negara yang terlibat dalam konflik menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan konsistensi kebijakan²³.

²³ Sean Ingle, "THE FALLOUT OF RUSSIA'S INVASION IN THE WIDE WORLD OF SPORTS No Title," *Journal of International Affairs*, 2023.

Rujukan ketujuh adalah melalui *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* yang ditulis oleh Bantekas, Ilias yang berjudul “*Sports Sanctions Against Russia Through the Lens of the Court of Arbitration for Sport*”. yang membahas mengenai bagaimana melihat respon yang dikeluarkan oleh lembaga olahraga terhadap Rusia melalui jendela pengadilan arbitrase olahraga yang berpihak dengan argumen dan putusan yang dikeluarkan oleh *FIFA* yang secara efektif mengeluarkan sanksi untuk negara kompetitor, dalam agenda *FIFA*. Sanksi terhadap entitas olahraga Rusia menjadi studi kasus yang menarik dalam pertemuan antara hukum internasional, politik, dan olahraga. Keterlibatan CAS mencerminkan tantangan hukum dan etika yang signifikan yang dihadapi oleh federasi olahraga internasional ketika menangani konflik yang sarat dengan politik. Keputusan yang diambil oleh *FIFA*, dan CAS menunjukkan kompleksitas dalam menavigasi tekanan politik sambil menjaga integritas kompetisi olahraga internasional.²⁴

Rujukan kedelapan melalui jurnal *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta* yang ditulis oleh Vasilyev, Iliia A. Vetrova, Evgenia G. yang berjudul *a New “Catch 22”: “Protective Measures”, “Preventive Measures” and “Sports Sanctions” Versus Russian Athletes* yang membahas mengenai bagaimana dampak dari rekomendasi Komite Olimpiade Internasional (IOC) terkait pengeluaran atlet Rusia dari kompetisi olahraga internasional. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, pada 28 Februari 2022, IOC merekomendasikan agar atlet Rusia hanya dapat berpartisipasi di bawah status netral. Meskipun rekomendasi ini tidak bersifat

²⁴ The Russian and The Court, “SPORTS SANCTIONS AGAINST RUSSIA THROUGH THE LENS OF THE COURT OF ARBITRATION FOR,” n.d., 1–25.

wajib, sebagian besar federasi olahraga internasional (ISFs) mengadopsinya, yang mengarah pada penangguhan atlet Rusia di berbagai cabang olahraga. Masalah utama yang dibahas adalah kerangka konseptual dari langkah-langkah yang diterapkan terhadap atlet Rusia, yang disebut sebagai "langkah perlindungan" dan "langkah pencegahan." Namun, dokumen ini berpendapat bahwa istilah-istilah tersebut dibentuk secara artifisial karena semua langkah tersebut memiliki tujuan yang sama: penangguhan atlet. Secara khusus, statuta ISF tidak secara eksplisit mengizinkan "langkah perlindungan" atau "langkah pencegahan," dan penerapan langkah-langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait dasar hukum dari penangguhan tersebut²⁵.

Rujukan kesembilan melalui jurnal *Voetbal- & Sportjuridische Zaken* yang ditulis oleh Duval, Antoine yang berjudul "*FIFA and UEFA'S Reaction to Russia's Invasion of Ukraine*" membahas mengenai invasi yang dilakukan oleh Rusia mengharuskan FIFA dan UEFA untuk menanggapi dampak sosial dan politik kepada Rusia, mereka secara serius dengan mengemban tanggung jawab mereka untuk mengatur sepak bola internasional dan Eropa dengan memperhatikan masalah politik dan hak asasi manusia yang terkait dengan kompetisi dan anggota mereka. Kesamaan dengan penelitian kali ini adalah pemberian sanksi kepada Rusia melalui agenda sepakbola guna mempertahankan integritas keduanya.

²⁵ Iliia A. Vasilyev and Evgenia G. Vetrova, "A New 'Catch 22': 'Protective Measures', 'Preventive Measures' and 'Sports Sanctions' versus Russian Athletes," *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Pravo* 14, no. 2 (2023): 510–20, <https://doi.org/10.21638/spbu14.2023.214>.

Rujukan kesepuluh, merupakan jurnal *International and Comparative Law Review*, yang ditulis oleh Jamali, yang berjudul “*Game Over for Russian Athletes? Human Rights Aspects of Measures Adopted by International Sports Organisations as a Response to the Russian Aggression Against Ukraine*”, yang membahas mengenai implikasi hak asasi manusia dari tindakan organisasi olahraga internasional. berangkat dari penilaian status hukum FIFA dan UEFA berdasarkan hukum internasional. Dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional tentang non diskriminasi melalui uji proporsionalitas.

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 Global Sport Governance

Aktor-aktor global, mengalami dinamika yang semakin kompleks, seiring dengan berjalannya globalisasi secara signifikan. Yaitu dengan munculnya aktor non-negara, yang diantaranya meliputi organisasi internasional, lembaga internasional, federasi internasional, dan sebagainya. Aktor non-negara tersebut dicirikan dengan, kompetensi dan kemampuan mereka secara otonomi, dan kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan guna mencapai kepentingan mereka, serta memiliki kapasitas secara signifikan, untuk mempengaruhi hubungan dengan aktor negara sekalipun, serta dapat mempengaruhi perilaku aktor lainnya secara signifikan²⁶. Dalam penjelasan mengenai global sport governance yang dikemukakan oleh Jean-Loup Chappelet, dalam artikel yang berjudul “*Assessing*

²⁶ Haideki Kan, “Actors in World Politics,” *Governmenta and Politics Volume II II* (2009): 242–59, <http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-32-05-03.pdf>.

Sport Governance Principles and Indicators”, *global sport governance* didefinisikan sebagai, kerangka pengelolaan tatanan olahraga, yang diterapkan oleh organisasi olahraga internasional, yang dimana kerangka tersebut dapat mempengaruhi sifat dan tindakan dari aktor lainnya, yang kemudian menimbulkan interaksi antara aktor eksternal dan juga, organisasi olahraga internasional, selaku yang mengelolah suatu bidang olahraga, sebagai upaya dari organisasi olahraga internasional untuk mengelola tatanan olahraga secara global. Hal tersebut guna memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas tatanan olahraga secara global. *Global Sport Governance* menyajikan, latar belakang, prinsip, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi olahraga internasional, guna mencapai tata kelola, serta penerapan prinsip, untuk menjaga integritas olahraga dan mengelolanya secara efisien²⁷.

Dalam *global sport governance*, menyajikan mengenai, beberapa aspek agar organisasi olahraga internasional, sebagai aktor non-pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk mengelola, federasi olahraga masing-masing dengan baik. Dalam hal tersebut dapat digunakan sebagai contoh diantaranya, seperti *International Olympic Committee (IOC)*, *Federation International de Football Association (FIFA)*, *Union European Football Association (UEFA)*, dan sebagainya. Beberapa aspek tersebut yang disajikan oleh *global sport governance* diantaranya, tantangan yang dihadapi oleh organisasi olahraga internasional, prinsip-prinsip tata kelola organisasi olahraga internasional, implementasi prinsip

²⁷ Jean Loup Chappelet and Michaël Mrkonjic, “Assessing Sport Governance Principles and Indicators,” *Research Handbook on Sport Governance*, no. November (2019): 10–28, <https://doi.org/10.4337/9781786434821.00008>.

organisasi olahraga internasional, evaluasi terhadap organisasi olahraga internasional²⁸.

Dalam mengelola sebuah organisasi diperlukan adanya persiapan, dalam berbagai aspek seperti keamanan, integritas, dan upaya perlindungan. Termasuk bagi organisasi olahraga internasional, yang dimana sampai saat ini dinamika olahraga seringkali digunakan oleh berbagai aktor, untuk mencapai kepentingan masing-masing. Hal tersebut dikarenakan aspek olahraga, tidak hanya digunakan oleh masyarakat sebagai dampak kesehatan, akan tetapi olahraga digunakan sebagai *entertainment*, dalam kehidupan sosial, yang tentunya akan sangat mempengaruhi berbagai macam tindakan dari suatu aktor. Oleh karena itu diperlukan adanya persiapan untuk menghadapi tantangan yang muncul, bagi organisasi olahraga internasional, berupaya adanya intervensi dari aktor eksternal terhadap tatanan olahraga secara global dari berbagai pihak. Sebagai contoh tindakan korupsi yang dilakukan oleh *FIFA* yang menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat publik terhadap organisasi *FIFA*, yang menimbulkan berbagai macam tuntutan dan gugatan, sehingga *FIFA* harus merespon tuntutan tersebut, guna mengembalikan citra dari organisasi *FIFA*²⁹.

Dalam *global sport governance*, menawarkan mengenai, prinsip-prinsip tata Kelola organisasi dengan baik, yang bertujuan untuk menjaga integritas organisasi melalui kebijakan, atau regulasi dari suatu organisasi olahraga

²⁸ Chappelet and Mrkonjic.

²⁹ "Korupsi *FIFA*: Dokumen Bank Tunjukkan Aliran Dana *FIFA*," BBC news Indonesia, 2015, https://www.bbc.com/indonesia/olahraga/2015/06/150607_olahraga_bukti_korupsi_FIFA_warner.

internasional. dalam *global sport governance*, organisasi olahraga internasional harus memiliki transparansi yang jelas, hal tersebut digunakan untuk menghindari miskomunikasi, sehingga organisasi olahraga internasional dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat, dengan terbuka melalui regulasi, dari organisasi olahraga tersebut. Kemudian dalam tata Kelola tersebut diperlukan akuntabilitas, yaitu bagaimana pengambilan keputusan dari organisasi olahraga internasional, harus bisa dipertanggungjawabkan, dan mampu untuk mengevaluasi tindakan organisasi tersebut, terhadap suatu isu. Kemudian yaitu integritas dan etika. Yang dimana organisasi olahraga internasional harus mampu menjaga integritas, olahraga dan juga etika, terhadap prinsip-prinsip olahraga. Hal tersebut untuk menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan kebijakan, yang tidak sesuai dengan prinsip dan etika olahraga secara global, yang akan berdampak pada letak integritas organisasi olahraga internasional.

Kemudian setelah adanya prinsip-prinsip organisasi internasional tersebut, diperlukan adanya implementasi dari prinsip tersebut. Hal tersebut menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi organisasi olahraga internasional, dikarenakan adanya kemungkinan masalah yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, seperti adanya ketidaksesuaian dengan kondisi global, yang dimana organisasi olahraga internasional perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan situasi global, agar penerapan dari suatu kebijakan bersifat adil, dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip netralitas olahraga secara global. kemudian juga termasuk adanya *enforcement*

yang lemah, dikarenakan, adanya mekanisme yang tidak cukup kuat dalam mengelola suatu organisasi olahraga internasional.

Kemudian aspek terakhir yang ditawarkan oleh *global sport governance*, untuk menerapkan organisasi olahraga yang efisien adalah, dengan melakukan tahap evaluasi dalam suatu kebijakan atau ketetapan organisasi olahraga internasional, meskipun tantangan dari suatu kebijakan tetap ada, sifat yang harus dimiliki oleh organisasi olahraga internasional yaitu dengan adanya dorongan kuat untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik dalam olahraga internasional. Penggunaan indikator yang terukur dan sistem pemantauan yang lebih baik dapat membantu organisasi olahraga untuk mengevaluasi efektivitas penerapan dari suatu kebijakan, dan regulasi. Selain itu, ada kebutuhan untuk membangun kesepahaman internasional mengenai definisi yang jelas tentang tata kelola olahraga yang baik, yang dapat diadopsi oleh semua pihak terkait.

Global sport governance, memastikan organisasi olahraga internasional, dapat mengelola organisasinya dengan efisien, dalam menghadapi berbagai tantangan, isu global, dan keterbatasan. Yang dimana dalam mengelola organisasi olahraga internasional, diperlukan berbagai macam aspek, dikarenakan kebijakan yang diputuskan oleh organisasi olahraga internasional, dapat mempengaruhi sifat, dan tindakan dari aktor lain, baik aktor negara, maupun aktor non-negara. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi tersebut diperlukan tata kelola yang baik, guna menjaga integritas, dan keamanan bagi suatu organisasi olahraga internasional.

dikarenakan peran olahraga yang semakin luas yang disebabkan oleh globalisasi³⁰. Contohnya olahraga digunakan sebagai sarana diplomasi antar negara, hingga upaya mencapai kepentingan dari suatu negara.

Dalam penelitian kali ini *global sport governance*, digunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh *FIFA*, selaku organisasi olahraga internasional, yang bertanggung jawab atas pengelolaan tatanan olahraga, dapat mempengaruhi, sifat serta perilaku aktor eksternal, dalam hal ini yaitu *RFU*. Tentunya *FIFA* diwajibkan untuk merespon perilaku *RFU*, berupa gugatan, setelah disahkannya kebijakan pemblokiran Rusia, dalam ajang *FIFA World Cup 2022*. Agar integritas organisasi olahraga internasional terjaga, serta memastikan kompetisi *FIFA World Cup*, berjalan sesuai ekspektasi *FIFA*, selaku penyelenggara kompetisi tersebut. Dalam upaya merespon gugatan tersebut, bagaimana *FIFA* memerankan tata kelola organisasi olahraga internasional, dapat dikaitkan dengan *global sport governance*, dimana aspek-aspek yang ditawarkan oleh *global sport governance*, mampu memberikan keterkaitan bagi *FIFA*, untuk mengelolah organisasi olahraga internasionalnya dengan baik, dalam upaya menjaga integritas dari organisasi tersebut. Yang diantaranya yaitu kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan, prinsip organisasi, implementasi dari suatu prinsip, dan evaluasi terhadap kebijakan, yang kemudian dengan menjadikan *FIFA* dapat mengelola organisasi olahraga internasional sesuai, dengan tujuan untuk menjaga integritas.

³⁰ Efthalia Chatzigianni, "Global Sport Governance: Globalizing the Globalized," *Sport in Society* 21, no. 9 (2018): 1454–82, <https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1390566>.

1.5.2 Organisasi internasional

Organisasi internasional memiliki kedudukan di ranah internasional serta memiliki sifat yang kuat dan memberikan pengaruh independen terhadap individu maupun kelompok dan negara dalam pengambilan keputusan. Secara historis orientasi dari didirikannya organisasi internasional adalah bertujuan untuk membantu negara-negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya, akan tetapi seiring dengan adanya dinamika global yang semakin kompleks, organisasi internasional memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan yang ditentukan sebagai dampak dari legitimasi yang diberikan kepada organisasi internasional. Perilaku hukum yang dimiliki organisasi internasional bersifat mutlak dalam hubungan internasional agar organisasi yang bersangkutan melaksanakan fungsi hukum tersebut, seperti membuat kontrak, perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, dan hak-hak tertentu lainnya organisasi internasional dapat dipandang melalui dua arah yang berbeda melalui sudut pandang ekonomi, dengan argumentasi tujuan organisasi tersebut dalam upaya mencapai kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan organisasi tersebut. Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi, organisasi internasional memiliki kewenangan dan independensi dalam menentukan arah kebijakannya.

Michael N. Barnett dan Martha Finnemore menjelaskan bahwa sifat organisasi internasional dapat ditelaah melalui dua aspek yaitu: (1) hubungan organisasi tersebut dengan lingkungan serta (2) otonomi yang dimiliki organisasi tersebut. Pada aspek yang pertama, Barnett dan Finnemore menyebutkan bahwa beberapa lingkungan dari organisasi yang bersifat kompetitif berdampak pada

adanya tekanan yang signifikan bagi lingkungan organisasi tersebut dan menciptakan perilaku yang efisien dan responsif. Organisasi internasional juga beroperasi sesuai kriteria dari lingkungan organisasi tersebut untuk mencapai hal yang rasional bagi organisasi tersebut, untuk mempertahankan kewenangan secara hukum dan terhindar dari ancaman global sehingga tidak mengganggu kedaulatan dari organisasi tersebut. Dalam hal ini kasus yang dilakukan oleh *FIFA* kepada Rusia merupakan bentuk implementasi dari organisasi dan lingkungannya, yang dimana *FIFA* melakukan hal yang responsif dan efektif, untuk mencapai kepentingan agar kedudukan *FIFA* tidak tersingkir oleh situasi perang di Ukraina. Upaya pemblokiran yang dilakukan oleh mayoritas federasi olahraga internasional dan juga lembaga-lembaga olahraga lainnya, tentunya memberikan tekanan terhadap *FIFA* selaku otoritas lembaga sepakbola dunia untuk melakukan hal serupa, hal tersebut merupakan bentuk dari bagaimana organisasi internasional berperilaku sesuai lingkungannya.

Sedangkan, pada aspek kedua, Barnett dan Finnermore mengemukakan bahwa organisasi internasional, baik yang beranggotakan negara atau non-negara memiliki independensi dalam menentukan arah kebijakannya. Dalam IGO, pada dasarnya negara juga merupakan aktor yang dapat membatasi aktivitas organisasi internasional, akan tetapi organisasi internasional bukanlah aktor yang pasif tanpa agenda independen mereka sendiri. Hal tersebut sekaligus menepis argumen mengenai organisasi internasional merupakan aktor yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dengan menggambarkan organisasi internasional sebagai cangkang yang kosong atau mesin yang dapat dimanipulasi oleh aktor lain, yang dimana

negara sebagai pencipta dari organisasi internasional dapat mengendalikan dan berpolitik dalam organisasi tersebut, dengan tujuan untuk mengupayakan kepentingan nasionalnya.³¹ Independensi organisasi internasional merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk mengelola kebijakan dan kewenangan kebijakannya sendiri untuk mencapai kepentingan organisasi tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal, yaitu aktor negara, maupun aktor non-negara. Karena independensi organisasi internasional, memastikan keputusan, dan kebijakan organisasi internasional, dibuat secara objektif, dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat merusak integritas organisasi internasional³².

Lebih lanjut mengenai konsep organisasi internasional menurut Clive Archer menjelaskan organisasi internasional merupakan bentuk Lembaga yang mengacu pada sistem dengan tujuan formal, yang diwujudkan dengan persetujuan negara-negara berdaulat, untuk mencapai kepentingan-kepentingan dari negara yang ada di dalamnya.³³ Menurut Archer, organisasi internasional juga dipandang sebagai sebuah aktor, yang dapat menentukan arah kebijakannya sendiri, salah satunya yaitu dengan berkewajiban untuk menetapkan kebijakan, dan merespon tuntutan terkait kebijakan yang ditetapkan, dikarenakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengelola suatu aktor, baik itu aktor negara, maupun non-

³¹ Michael N. Barnett and Martha Finnemore, *The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations*, *International Security and Conflict*, 1999, <https://doi.org/10.4324/9781315251943-30>.

³² Yoram Z. Haftel and Alexander Thompson, "The Independence of International Organizations: Concept and Applications," *Journal of Conflict Resolution* 50, no. 2 (2006): 253–75, <https://doi.org/10.1177/0022002705285288>.

³³ Clive Archer, *International Organization*, *Psychology Press*, vol. 210, 1940, <https://doi.org/10.1177/000271624021000105>.

negara, pada umumnya akan menimbulkan pro dan kontra, yang menghasilkan dukungan, tuntutan, hingga gugatan.

Dalam penelitian ini konsep OI digunakan untuk menjelaskan mengenai kewenangan *FIFA* selaku organisasi internasional, untuk menentukan, dan memutuskan kebijakannya guna mencapai kepentingan organisasi, yang diantaranya untuk menjamin keamanan, keberlangsungan, kompetisi, serta integritas organisasi olahraga internasional *FIFA*, serta respon *FIFA* dalam merespon gugatan *RFU*, yang dimana secara otonomi *FIFA*, berhak memutuskan kebijakan tersebut sesuai pada undang-undang, dan regulasi yang ada dalam organisasi *FIFA*. Tentunya organisasi internasional *FIFA*, mempunyai tantangan untuk merespon gugatan *RFU* tersebut, dikarenakan integritas, dan kedaulatan *FIFA* akan terganggu, apabila *FIFA* terlambat untuk mengambil sikap terkait gugatan yang diajukan oleh lembaga eksternal, yang tentunya akan menimbulkan resiko pada kompetisi yang diadakan oleh *FIFA*, yaitu *FIFA World Cup 2022*.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu kejadian atau untuk mengungkapkan

dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam rumusan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu terkait sebab akibat dari kebijakan *FIFA* setelah disahkannya kebijakan pemblokiran Rusia pada kompetisi *FIFA World Cup 2022*, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif

1.6.2 Metode Analisa Data

Dalam penyusunannya, penulis menggunakan jenis deskriptif kualitatif. dengan melakukan penelitian, mengevaluasi hasil temuan, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan tahap pekerjaan audit operasional. Melalui pendekatan ini, data diolah dan ditelaah setelah dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dan digambarkan keadaan fenomena saat ini dengan menggunakan fakta-fakta berdasarkan data yang diperoleh.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur seperti artikel atau jurnal, dan sumber-sumber lainnya di internet. Metode Penelitian yang digunakan ada dua jenis yaitu, yang pertama data primer yang diperoleh dari data hasil wawancara atau observasi langsung ke objek penelitian.. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung tetapi menggunakan data-data yang telah dihasilkan dari penelitian yang sebelumnya. Sumber data yang digunakan antara lain jurnal ilmiah, makalah, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data-data tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat analisa maupun data pendukung untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.7 Ruang lingkup Penelitian

1.7.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini ditujukan untuk penulis agar tetap konsisten dan terarah dalam membuat pembahasan pada penelitian yang dilakukan, sehingga batasan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu “penyelesaian gugatan *RFU* yang dilakukan oleh *FIFA* terhadap pemblokiran Rusia pada *FIFA World Cup 2022*”. Penulis membatasi materi penelitian ini pada sengketa kebijakan antara *FIFA* dan *RFU* atas pemblokiran Rusia pada ajang *FIFA World Cup 2022*, yang dilatar belakangi oleh adanya invasi Rusia ke Ukraina. Penulis memutuskan untuk mengambil permasalahan tersebut sebagai batasan materi karena dianggap relevan dengan tujuan dilakukannya penelitian ini.

1.7.2 Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu penelitian yang dilakukan adalah sebelum hingga sesudah dilaksanakannya kompetisi *FIFA World Cup 2022*. Bertepatan pada saat permulaan awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Yang kemudian dilakukan pemblokiran oleh *FIFA* kepada Rusia dalam ajang *FIFA World Cup 2022* dan kebijakan pemblokiran tersebut mendapatkan respon dari pihak federasi sepakbola Rusia.

1.8 Argumen Pokok

Dalam penelitian kali ini penulis mendeskripsikan persoalan mengenai upaya *FIFA* dalam penyelesaian gugatan *RFU*, yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemblokiran yang dilakukan oleh *FIFA*. selaku lembaga yang mengatur segala aspek dalam sepakbola, pada kebijakan pemblokiran Rusia dalam ajang *FIFA World Cup 2022*. penyelesaian sengketa kebijakan antara *FIFA* dan *Russian Football Union (RFU)* menggambarkan proses yang kompleks dan saling memengaruhi antara kebijakan yang dibuat oleh *FIFA* sebagai otoritas sepakbola internasional dengan reaksi hukum yang diajukan oleh *Russian Football Union (RFU)* sebagai badan pengelola sepakbola Rusia Dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan, *FIFA* selaku organisasi harus menerapkan prinsip organisasi olahraga internasional, dalam menetapkan suatu kebijakan, agar mampu untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat oleh *FIFA*. Tentunya kebijakan

tersebut, dibuat melalui proses, dan analisis yang cukup signifikan sebelum akhirnya kebijakan tersebut disahkan secara resmi oleh *FIFA*. Dikarenakan *FIFA* bertanggung jawab secara penuh dalam mengupayakan implementasi dari kebijakan pemblokiran Rusia dalam *FIFA World Cup 2022*.

Hingga sesaat setelah melalui proses dalam menetapkan kebijakan tersebut, tentunya *FIFA* selaku pembuat kebijakan pemblokiran Rusia, untuk menjaga integritas, dan keamanan kompetisi *FIFA World Cup 2022*, mendapatkan tantangan yang harus dihadapi agar implementasi dari kebijakan tersebut terjamin, tidak terganggu, serta tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain. *RFU*, selaku pihak penggugat, merasa dirinya dirugikan, atas kebijakan pemblokiran tersebut, dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh *RFU*, kepada pihak pengadilan olahraga yaitu *CAS*. Oleh karena itu kebijakan yang diputuskan oleh *FIFA*, mempengaruhi Tindakan *RFU*, dengan berupa menggugat *FIFA*, kepada *CAS*, atas kebijakan, *FIFA* yang dianggap tidak bertanggung jawab serta merugikan bagi pihak *RFU*.

Gugatan tersebut dianggap sebagai hal yang umum setelah sebuah kebijakan disahkan oleh aktor tertentu, *FIFA* memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk melakukan upaya penyelesaian tersebut dengan cara merespon gugatan *RFU*, agar *FIFA* berhasil untuk mengimplementasikan kebijakan pemblokiran Rusia dalam ajang *FIFA World Cup 2022*. Bagaimana *FIFA* berupaya untuk menyelesaikan gugatan dengan cara merespon gugatan yang disampaikan oleh *RFU*, kepada *CAS*, sangatlah berpengaruh terhadap, keberlangsungan kompetisi *FIFA World Cup 2022*. *FIFA* menjelaskan upaya pemblokiran tersebut didasarkan pada undang-undang statuta *FIFA*, serta regulasi dalam *FIFA World Cup*. *FIFA*

menegaskan bahwasanya kebijakan tersebut bersifat objektif, dan memiliki tujuan yang jelas, untuk menjaga integritas, dan keamanan bagi berlangsungnya kompetisi *FIFA World Cup 2022*, serta sesuai dengan undang-undang kebijakan *FIFA*, dan tidak menyalahgunakan kebijakan. Tentunya upaya *FIFA* dalam merespon gugatan tersebut mendapatkan hasil putusan terhadap gugatan yang diberikan oleh *RFU*, kepada *CAS*, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap, proses berjalannya kompetisi *FIFA World Cup 2022*. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh *FIFA* berkaitan dengan mempertahankan legitimasi dan kewenangannya dalam mengatur kompetisi global, di tengah usaha *RFU* untuk mempertahankan kepentingan nasional dan keberlangsungan aktivitas sepakbolanya.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini dengan lebih mudah, penulis Menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan

| | |
|-------|---|
| BAB I | <p>PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p> 1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> |
|-------|---|

| | |
|--------|--|
| | <p>1.5 Teori/Konsep</p> <p>1.5.1 <i>Public Policy</i></p> <p>1.5.1 Organisasi internasional</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6. Metode Analisa Data</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.7.1 Batasan Materi</p> <p>1.7.2 Batasan Waktu Penelitian</p> <p>1.8 Argumen Pokok</p> <p>1.9 Sistematika Penulisan</p> |
| BAB II | <p>PROSES KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN RUSIA oleh FIFA DALAM AJANG FIFA WORLD CUP 2022</p> <p>2.1 Hubungan FIFA Dengan Rusia Sebelum Invasi Rusia ke Ukraina</p> <p>2.2 Reaksi FIFA Terhadap invasi yang dilakukan Rusia</p> <p>2.3 Alasan FIFA Melakukan Pemblokiran Terhadap Rusia</p> <p>2.3.1 Berdasarkan <i>FIFA Regulation</i></p> <p>2.3.2 Pengaruh Lingkungan dan Sosial</p> <p>2.4 Keputusan FIFA untuk memblokir Rusia dalam FIFA World Cup 2022</p> |

| | |
|----------------|---|
| <p>BAB III</p> | <p>GUGATAN <i>RUSSIAN FOOTBALL UNION</i> TERHADAP KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN RUSIA PADA AJANG <i>FIFA WORLD CUP 2022</i></p> <p>3.1 Prinsip Netralitas Olahraga Secara Global dan Inkonsistensi <i>FIFA</i></p> <p>3.2 Gugatan <i>Russian Football Union (RFU)</i> kepada <i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i> terkait kebijakan <i>FIFA</i> terhadap Rusia</p> <p>3.2.1 Hak Partisipasi Tim Nasional Rusia</p> <p>3.2.2 Dampak Bagi Tim Nasional Rusia</p> <p>3.2.3 Kerugian Finansial yang Dialami <i>Russian Football Union (RFU)</i></p> <p>3.3 Permohonan <i>Russian Football Union (RFU)</i> Kepada <i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i> terkait kebijakan pemblokiran yang dilakukan <i>FIFA</i></p> |
| <p>BAB IV</p> | <p>UPAYA <i>FIFA</i> DALAM MERESPON GUGATAN <i>RUSSIAN FOOTBALL UNION</i></p> <p>4.1 Langkah Organisasi Olahraga Dalam Perlindungan dan Keselamatan</p> <p>4.2 Pembelaan <i>FIFA</i> Atas Gugatan <i>Russian Football Union (RFU)</i> Kepada <i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i></p> |

| | |
|-------|---|
| | <p>4.2.1 Legalitas Kebijakan <i>FIFA</i></p> <p>4.2.2 Penerapan Prinsip Netralitas Politik dalam Olahraga</p> <p>4.2.3 Upaya Keamanan dan Integritas</p> <p>4.3 Dukungan <i>Court of Arbitration for Sport (CAS)</i> terkait tindakan kebijakan <i>FIFA</i></p> <p>4.4 Keberhasilan <i>FIFA</i> dalam upaya mengimplementasikan kebijakan pemblokiran</p> |
| BAB V | <p>PENUTUP</p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p> |

